

## Analysis of LLDIKTI Region II Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) for 2018-2020 Fiscal Year

### Analisa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LLDIKTI Wilayah II Tahun Anggaran 2018-2020

Alwi

STIE Abdi Nusa Palembang

Email: [alwi.palembang@gmail.com](mailto:alwi.palembang@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2022]

Revised [9 Maret 2022]

Accepted [19 Maret 2022]

#### KEYWORDS

LLDIKTI Region II,  
Performance Indicators of  
Budget Implementation,  
Budget Management

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LLDIKTI Wilayah II tahun 2018-2020. Jenis penelitian yaitu deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari aplikasi Kementerian Keuangan khusus satker LLDIKTI Wilayah II. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah berupaya maksimal dalam melaksanakan semua indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Hal ini terlihat dari capaian IKPA yang terus meningkat yaitu di tahun 2018 sebesar 87,74. Tahun 2019 sebesar 91,76 dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 96,40. Capaian pada tahun 2020 menjadi nilai tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah II, mengingat angka ini dinilai sangat memuaskan, selain itu menjadi tantangan terbesar di tahun 2021 apakah dapat mempertahankan capaian tersebut atau sebaliknya akan turun. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran agar lebih meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam pengelolaan anggaran.

#### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the comparison of the value of the LLDIKTI Wilayah II Budget Implementation Performance Indicator (IKPA) in 2018-2020. This type of research is comparative descriptive with the data collection method using secondary data taken from the application of the Ministry of Finance, specifically LLDIKTI Wilayah II. The results of this study indicate that LLDIKTI Wilayah II has made maximum efforts in implementing all performance indicators of budget implementation (IKPA). This can be seen from the achievements of IKPA which continue to increase, namely in 2018 amounting to 87.74. 2019 amounted to 91.76 and in 2020 an increase of 96.40. The achievement in 2020 is a special value for LLDIKTI Wilayah II, considering that this figure is considered very satisfying, besides that it is the biggest challenge in 2021 whether it can maintain this achievement or will it decrease otherwise. This requires special attention from all parties involved in budget management in order to further improve discipline, order and timeliness in budget management.

## PENDAHULUAN

Pengukuran terhadap kinerja sektor publik (satuan kerja) sangat penting untuk menilai sejauh mana satuan kerja tersebut bisa melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menyangkut prestasi penyelenggaraan negara dalam satuan kerja tersebut. Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Kristiyanti, 2012). Sedangkan menurut Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009:121), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sedangkan pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:25 dalam Purwadi, 2012) digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

## LANDASAN TEORI

Salah satu indikator penilaian kinerja satuan kerja adalah Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas atas pelaksanaan

anggaran belanja kementerian negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun tujuan pengukuran kinerja IKPA adalah (1) Kelancaran pelaksanaan anggran; (2) Mendukung manajemen kas; (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk itulah penilaian terhadap IKPA menjadi hal yang sangat penting terhadap pelaksanaan anggaran di satuan kerja. Adapun rincian penilaian IKPA adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Reformasi IKPA 2020 – Pokok-Pokok Perubahan**

Pada tahun 2019 terdapat 12 indikator yang dijadikan indikator IKPA, tetapi pada tahun 2020 menjadi 13 indikator. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan berupa konfirmasi capaian output terhadap kinerja keuangan.

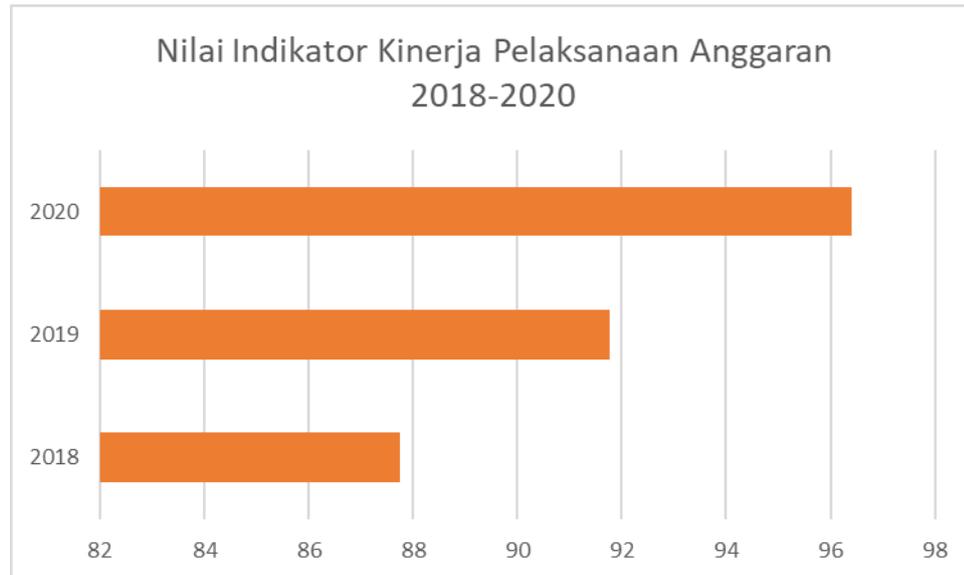
## METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Jln. Srijaya No.883 KM 5,5 Palembang dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Sugiyono (2009:135) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran LLDIKTI Wilayah II mengalami peningkatan tahun 2018 s.d 2020. Hal ini memberikan gambaran bahwa LLDIKTI bisa memaksimalkan potensi anggaran yang dimiliki. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran LLDIKTI Wilayah II ditampilkan pada grafik berikut ini:



**Gambar 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018-2020**

Dari grafik di atas, terlihat bahwa nilai IKPA LLDIKTI Wilayah II mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Tahun 2018 nilai IKPA LLDIKTI Wilayah II adalah 87,74. Tahun 2019 sebesar 91,76 dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 96,40. Hal ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II senantiasa meningkatkan kinerja anggarannya agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun untuk kategori IKPA dari tahun mengalami perubahan yaitu tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan 12 kategori, sedangkan untuk tahun 2020 dengan 13 dengan penambahan yaitu konfirmasi capaian output. Perincian untuk masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian IKPA LLDIKTI Wilayah II Tahun 2018-2020**

No	Keterangan	2018	2019	2020
a	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			
1	Revisi DIPA	4	5	4,38
2	Halaman III DIPA	4,97	2,58	3,88
3	Pagu Minus	5	4	4,99
	Kepatuhan terhadap Regulasi			
b	4 Data Kontrak	6,30	10,95	15
	5 Pengelolaan UP dan TUP	9,20	9,50	7,68
	6 Rekon LPJ Bendahara	0	5	5
	7 Dispensasi SPM	5	4	5
	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			
	8 Penyerapan Anggaran	20	20	15
	9 Penyelesaian Tagihan	18,79	15	11,61
	10 Konfirmasi Capaian Output	0	0	10
	11 Retur SP2D	4,93	5,93	4,87
c	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			
	12 Perencanaan Kas	5	5	5
	13 Kesalahan SPM	4,55	4,80	4
<b>Nilai Total</b>		<b>87,74</b>	<b>91,76</b>	<b>96,40</b>

Sumber: Data diolah dari <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

1. Revisi DIPA. Penilaian terhadap indikator Revisi DIPA Tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Berdasarkan tabel di atas, Revisi DIPA Tahun 2018 sebesar 4, tahun 2019 sebesar 5 dan tahun 2020 adalah sebesar 4,38. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas

perencanaan DIPA tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Karena revisi yang seharusnya dilaksanakan 1 kali setiap triwulan atau sebanyak 4 kali dalam setahun melebihi target yang seharusnya, yakni sebanyak 7 kali, sehingga berpengaruh terhadap nilai Revisi DIPA. Untuk itu, seharusnya LLDIKTI Wilayah II harus lebih selektif melaksanakan revisi anggaran karena berpengaruh terhadap nilai IKPA kumulatifnya.

2. Halaman III DIPA. Penilaian terhadap indikator Halaman III DIPA tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Berdasarkan tabel di atas, Halaman III DIPA pada tahun 2018 sebesar 4,97, 2019 sebesar 2,58 dan tahun 2020 adalah sebesar 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II pada tahun 2020 telah melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dan realisasi pada Halaman III DIPA lebih baik dibandingkan tahun 2019. Seharusnya penyerapan anggaran harus disesuaikan dengan rencana penarikan, sehingga nilai deviasi yang terjadi tidak berpengaruh terhadap penilaian IKPA yang terjadi.
3. Pagu Minus. Penilaian terhadap indikator Pagu Minus tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Berdasarkan tabel di atas, Pagu Minus pada tahun 2018 sebesar 5, tahun 2019 sebesar 4 dan tahun 2020 sebesar 4,99. Hal ini menunjukkan revisi terhadap adanya pagu minus pada tahun anggaran 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2019 yaitu dilakukan revisi RKA-K/L terhadap pagu minus, yang merupakan revisi POK terhadap belanja yang berlebih dan direvisi pada akun belanja minus. Pagu minus terjadi pada akun Belanja Gaji (51) yang berpengaruh pada penilaian IKPA.
4. Data Kontrak. Penilaian terhadap indikator Data Kontrak tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan tabel di atas, Data Kontrak pada tahun 2018 sebesar 6,30, tahun 2019 sebesar 10,85 dan tahun 2020 sebesar 15. Hal ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II tahun 2020 mengalami peningkatan dalam kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.
5. Pengelolaan UP dan TUP. Penilaian terhadap indikator Pengelolaan UP dan TUP tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Bahkan di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 7,68 dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,50 dan tahun 2018 sebesar 9,20. Hal ini menunjukkan keterlambatan dalam pengajuan UP dan TUP di tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada baiknya LLDIKTI Wilayah II memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dan SP2D UP/TUP terakhir paling lambat 30 hari kalender.
6. Rekon LPJ Bendahara. Penilaian terhadap indikator Rekon LPJ Bendahara tahun 2018-2019 cenderung stabil di angka 5, pada tahun 2019-2020. Untuk tahun 2018, indikator ini tidak dilakukan penilaian. Hal ini disebabkan danya transisi terhadap Aplikasi LPJ Bendahara. Dan penilaian terhadap indikator ini di tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II disiplin dan tertib dalam penyampaian LPJ Bendahara setiap bulannya dan memastikan sudah diverifikasi KPPN melalui Aplikasi SPRINT.
7. Dispensasi SPM. Penilaian terhadap indikator Dispensasi SPM tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Pada tahun 2018 mencapai angka 5, tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan di angka 4. Tetapi di tahun 2020 mengalami peningkatan di angka 5. Hal ini menunjukkan kinerja LLDIKTI Wilayah II tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2019. Selain itu, LLDIKTI Wilayah II senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana agar tidak terjadi keterlambatan.
8. Penyerapan Anggaran. Penilaian terhadap indikator Penyerapan Anggaran tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari segi bobot penilaian. Pada tahun 2018 dan 2019 nilainya 20 sedangkan di tahun 2019 nilainya 15. Meski secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.
9. Penyelesaian Tagihan. Penilaian terhadap indikator Penyelesaian Tagihan tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Di tahun 2018 sebesar 18,79, tahun 2019 sebesar 15 dan tahun 2020 sebesar 11,6. Hal ini menunjukkan LLDIKTI Wilayah II mengalami penurunan dalam penyelesaian tagihan kontraktual LS paling lambat 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani oleh rekanan dan sudah diajukan SPM ke KPPN.
10. Konfirmasi Capaian Output. Penilaian terhadap indikator Konfirmasi Capaian Output merupakan indikator yang baru di IKPA dan baru diterapkan di tahun 2020. Pada tahun 2020 indikator ini mencapai angka 10, artinya LLDIKTI Wilayah II tepat waktu dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAS KPPN.
11. Retur SP2D. Penilaian terhadap Retur SP2D tahun 2018-2020 mengalami angka yang tidak stabil. Pada tahun 2018 sebesar 4,93, tahun 2019 sebesar 5,93 dan pada tahun 2020 sebesar 4,99. Hal ini menunjukkan Retur SP2D tahun 2020 mengalami perubahan lebih baik dibanding tahun 2019, selain itu LLDIKTI Wilayah II lebih meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen

- pembayaran dalam SP2D terutama dalam kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga atau penerima pembayaran.
12. Perencanaan Kas. Penilaian terhadap indikator Perencanaan Kas tahun 2018-2020 menunjukkan angka yang stabil yaitu diangka 5. Hal ini menunjukkan LLDIKTI Wilayah II telah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam perencanaan kas (RPD Harian) untuk transaksi dalam kategori besar > 1 Milyar.
  13. Kesalahan SPM. Penilaian terhadap indikator Kesalahan SPM tahun 2018 – 2020 menunjukkan angka yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 4,55, tahun 2019 sebesar 4,80 dan tahun 2020 sebesar 4. Hal ini menunjukkan LLDIKTI Wilayah II telah meningkatkan ketelitian dalam pengajuan SPM sehingga tingkat kesalahan SPM menurun di tahun 2020.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas menunjukkan LLDIKTI Wilayah II telah meningkatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2018-2020. Hal ini terlihat dari angka yang dicapai, yaitu 2018 sebesar 87,74. Tahun 2019 sebesar 91,76 dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 96,40. Capaian pada tahun 2020 menjadi nilai tersendiri bagi LLDIKTI Wilayah II, mengingat angka ini dinilai sangat memuaskan, selain itu menjadi tantangan terbesar di tahun 2021 apakah dapat mempertahankan capaian tersebut atau sebaliknya akan turun. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran agar lebih meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam pengajuan dan pembayaran dalam pengelolaan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2928-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-tahun-anggaran-2020.html>

<https://kppnbandung2.com/ikpa>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tinjauan-atas-relevansi-penggunaan-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-dalam-reformasi-birokrasi/>

<http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html>

Kristiyanti, Mariana. Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. Majalah Ilmiah Infomatika, Universitas AKI.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Mohammad Mahsun (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, edisi pertama, BPFE, Yogyakarta.

Purwadi, Yuni dan Retno Murni Sari. Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Blitar, STIE Kesuma Negara Blitar, 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Robertson, Gordon. "Reviu Kinerja". Lokakarya Reviu Kinerja. BPKP dan Executive Education, 2002.

Sugiyono. (2014). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.